

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Anwar Sanusi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta
- Andika Sari, Fita (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Anggraini, L. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Skpd Di Prov. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 670–684.
- Armia, Kamaliah, & Indrawati, N. 2020. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kesulitan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Universitas Riau. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 1–17.
- Arinda, Carina Puspita, 2020 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Profesionalisme Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Benjamin, W. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD di Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*
- Fadilah, M. N. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Kinerja, Internal Dan Kualitas Sdm Terhadap Akuntabilitas Bpkpd. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–17. <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1365>
- Fitrawati, Kahar, A., & A, M. I. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong). *E Jurnal Katalogis*, 5(12), 1–8.

- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit.
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Kanji, L. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, Xix, 73–92. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/JIB/article/view/9>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pergantian Kepala SKPD Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 62–73.
- Pitaloka, J. J., & Handayani, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada OPD Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–20.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Putri, A. (2017). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia. *Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*, 2(2), 2010–2012.
- Pusdiklatwas BPKP. 2011. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor: BPKP RI.
- Rahayu, D. I. (2014). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Pt Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk (Studi, 564, 1–73.
- Saifrizal, M. (2019). Instansi Pemerintahan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 8(16), 9.
- Samosir, T. K. J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, Dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Bpkad Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). 1(2), 6–38.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. SNA 9 Padang.
- Wahid, I., Nasir, A., & Supriono. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2457–2471.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>

#### **Sumber Internet :**

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2021, September 13). Sumsel Peringkat tertinggi ke 4 sebagai Provinsi dengan peningkatan produksi Padi tertinggi tahun 2019-2020. Retrieved from [sumselprov.go.id](https://www.sumselprov.go.id): <https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/Sumsel-Peringkat-Tertinggi-ke-4-Sebagai-Provinsi-dengan-Peningkatan-Produksi-Padi-Tertinggi-tahun-20192020-HD-Terima-Penghargaan>

#### **Peraturan Pemerintah :**

- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- \_\_\_\_\_. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2015). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- \_\_\_\_\_. (2007). Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

\_\_\_\_\_. (2003). Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003.  
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman  
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004  
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/  
Lembaga.